



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang lebih tepat dan terarah melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan arus reformasi yang turut mempengaruhi sistem perencanaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah, maka perencanaan atau pengambilan keputusan tentang penetapan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan cara pencapaiannya diharapkan lebih berfokus dan berorientasi kepada hasil yang lebih dikenal dengan Perencanaan Berbasis Kinerja.

Perencanaan kinerja intinya menetapkan target (*quantitative objectives*) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan tahap penting dalam melaksanakan rencana strategis (renstra) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan.

Rencana Kinerja PD merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh PD Kecamatan Membalong dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari RPJMD Kabupaten Belitung dan Renstra PD Kecamatan Membalong untuk tahun yang bersangkutan.



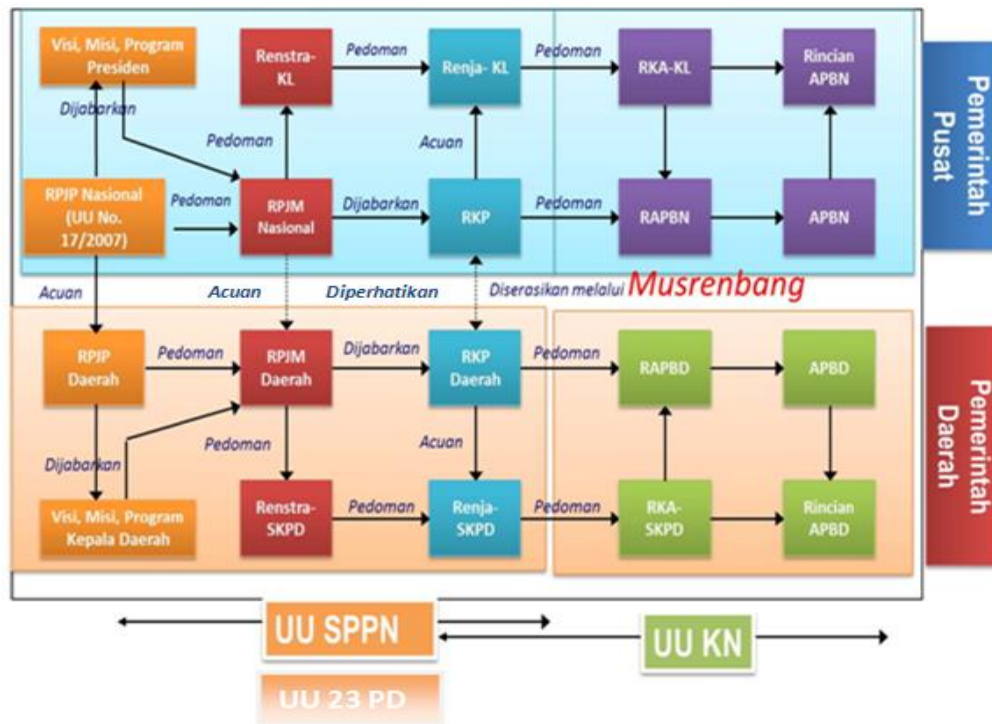
Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Membalong sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja,
2. Penyiapan data dan informasi,
3. Penyusunan rancangan awal,
4. Perumusan rancangan,
5. Verifikasi rancangan,
6. Perumusan rancangan akhir,
7. Verifikasi rancangan akhir, dan
8. Penetapan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah.

Program, kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud ada saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman bagi Perangkat daerah Kecamatan Membalong dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan selanjutnya akan menjadi bahan dalam proses penyusunan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Berikut gambaran keterkaitan antara Renstra, Renja, RKPD dan Proses penyusunan APBD.



Dengan demikian dapat dimaknai bahwa keberadaan dokumen Rencana Kerja sangat penting bagi Perangkat Daerah dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran. Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja maka tahapan kebijakan yang dimulai dengan formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi menjadi optimal dalam upaya akselerasi program pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Membalong tahun 2024, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;



19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah



Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah Kecamatan Membalong adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Membalong Tahun 2024-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja PD Kecamatan Membalong adalah

1. Menselaraskan antara Renja Perangkat Daerah dengan RPD tahun 2024.
2. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja anggaran (RKA)
3. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam upayanya melaksanakan pelayanan
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.



6. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan selanjutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan dokumen rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung tahun 2024, disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kebijakan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Membalong Tahun 2024 merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun ke-1 yang merupakan proses dalam pemilihan Bupati baru untuk kabupaten Belitung. Pencapaian pada tahun 2023 merupakan pencapaian Renstra Strategis periode sebelumnya yaitu Renstra (tahun 2018-2023) berikut pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel dibawah ini:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d
Tahun 2022
Kabupaten Belitung

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Membalong

Kode	Urusan/bidang Urusan Pemerintah daerah dan program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kgiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (renstra Perangkat Daerah) tahun 2024	Realisasi Target kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat Daerah tahun (2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja PD tahun (2021)	Realisasi Renja PD tahun (2021)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6x100)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4x100)
3	01									
		Urusan : Pemerintahan Fungsi Penunjang Lainnya								
3	01	05								
		Bidang Urusan: Lainnya								
3	01	05	23							
		1. Program: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan								



					1. Presentase tingkat keselarasan usulan Musrenbang Kecamatan terhadap prioritas perencanaan Kabupaten	92.50%					100%	100%	108,11%
				1. Kegiatan: Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Keluaran: Dokumen hasil Musrenbang Hasil : Rencana Pembangunan Kecamatan	92.50%					100%	100%	108,11%
					2. Jumlah Prestasi Kecamatan di Tingkat Kabupaten								
				2. Kegiatan : Pemilihan duta Kecamatan	Keluaran : Jumlah Peserta duta kecamatan Hasil: Prestasi Pemuda	100%					100%	100%	100%
				3. Kegiatan: Penguatan Bidang Kesehatan Masyarakat	Keluaran: Jumlah Kelompok Kesehatan yang dinilai Hasil: Prestasi Kelompok Kesehatan	100%					100%	100%	100%
				4. Penguatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Keluaran: Jumlah desa yang mengikuti kegiatan di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga Hasil:Prestasi Kesejahreaan masyarakat	100%					100%	100%	100%
				5. Penguatan bidang olahraga masyarakat	Keluaran: Jumlah desa yang mengikuti kegiatan di bidang olahraga masyarakat Hasil: Prestasi masyarakat dibidang olahraga	100%					100%	100%	100%



				6. Penguatan nilai-nilai kebangsaan	Keluaran: Jumlah peserta paskibra Hasil: Prestasi pemuda	100%					100%	100%	100%
				7. Pembinaan nilai-nilai keagamaan	Keluaran: Jumlah desa yang mengikuti kegiatan dibidang keagamaan Hasil: Prestasi masyarakat dibidang keagamaan	100%					100%	100%	100%
				8. Penguatan bidang seni dan budaya	Keluaran: Jumlah desa yang mengikuti kegiatan dibidang seni dan budaya lokal Hasil: Prestasi masyarakat dibidang seni dan budaya	100%					100%	100%	100%
3	01	05	24	3. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dan/atau kelurahan	Presentase Desa dan/atau kelurahan taat administrasi	95%					100%	100%	105,26%
				Kegiatan:									
				1. Pembinaan pemerintahan desa	Keluaran: Perangkat desa dan atau kelurahan yang dibina Hasil: Prestasi desa yang taat administrasi	100%					100%	100%	100%
				2. Monitoring dan evaluasi pembangunan desa	Keluaran: Dokumen hasil monev Hasil: Prestasi desa yang taat administrasi	100%					100%	100%	100%



				3. Evaluasi rencana pembangunan pemerintahan desa	Keluaran: Hasil evaluasi RPJMDES,RKPDDes,RAPBDes Hasil: Presentase desa yang taat administrasi	100%	100	100	100	100	100%	100%	100%
				4. Evaluasi perkembangan desa	Keluaran: Dokumen evaluasi perkembangan desa dan /atau kelurahan Hasil: Presentase desa yang taat administrasi	100%	100	100	100	100	100%	100%	100%
				2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Kegiatan:								100%	100%
				1. Penyediaan jasa surat mnyurat	Keluaran: Jasa surat menyurat Hasil: Kelancaran operasional kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				2. Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	Keluaran: Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Hasil: Kelancaran operasional kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				3. Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : alat tulis kantor Hasil: Kelancaran operasional kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Keluaran: Barang cetakan dan penggandaan Hasil: Kelancaran operasional kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



				5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran: Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil: Kelancaran operasional kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				6. Penyediaan bahan bacaan	Keluaran: Bahan bacaan Hasil: Kelancaran operasional kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				7. Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran: Makanan dan minuman Hasil: Kelancaran operasional kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran: Rapat-rapat koordinasi a konsultasi keluar daerah Hasil: Kelancaran operasional kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				9. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Keluaran: Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil: Kelancaran operasional kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				10. Kesejahteraan pegawai non PNS	Keluaran: Kesejahteraan pegawai non PNS Hasil: Kelancaran operasional kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				3. Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%						100%	100%	100%
				Kegiatan:										
				1. Pengadaan mebeulair	Keluaran: Mebeulair	100%		100	100	100	100%	100%	100%	



					Hasil: Kelancaran operasional kantor								
				2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Keluaran: Perlengkapan gedung kantor,meeting portable speaker,jam dinding,umbul-umbul 5 m, bendera kantor 120 x 180,bendera kantor 60x90 Hasil: Kelancaran operasional kantor	100%		100	100	100	100%	100%	100%
				3. Pengadaan Peralatan gedung kantor	Keluaran: Peralatan Gedung kantor Hasil: Kelancaran operasional kantor	100%		100	100	100	100%	100%	100%
				4. Pemeliharaan gedung kantor	Keluaran: Gedung kantor dalam kondisi baik Hasil: Kelancaran operasional kantor	100%	100	100	100	100	100%	100%	100%
				5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Keluaran: Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil: Kelancaran operasional kantor	100%	100	100	100	100	100%	100%	100%
				6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran: Perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik Hasil: Kelancaran operasional kantor	100%	100	100	100	100	100%	100%	100%
				7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran: Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Hasil: Kelancaran operasional kantor	100%	100	100	100	100	100%	100%	100%



				8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%					100%	100%	100%
				Kegiatan:									
				1. Pengadaan mesin absensi	Keluaran: Mesin absensi Hasil: Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	100%	100	100	100	100	100%	100%	100%
				2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keluaran: Pakaian dinas beserta perlengkapannya Hasil: Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	100%	100	100	100	100	100%	100%	100%
				3. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	Keluaran: Pakaian hari-hari tertentu Hasil: Kepatuhan aparatur terhadap aturan kepegawaian	100%		0	0	0	100%	100%	100%
				9. Program Peningkatan Kompetensi sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Meningkatkan Kompetensinya sesuai Perencanaan	100%					100%	100%	100%
				Kegiatan:									
				1. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Keluaran: Jumlah Apartur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Daerah Hasil: Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan apartur perangkat daerah	100%	100	100	100	100	100%	100%	100%



				10. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100%						100%	100%	100%
				Kegiatan:										
				1. Penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah	Keluaran: dokumen keuangan perangkat daerah Hasil: Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	100%	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
				2. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah	Keluaran: Dokumen perencanaan perangkat daerah Hasil: terpenuhinya dokumen sesuai peraturan	100%	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
				3. Penyusunan dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah	Keluaran: Dokumen pelaporan perangkat daerah Hasil: Terpenuhinya dokumen sesuai ketentuan	100%	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
				4. Promosi Pembangunan daerah	Keluaran: Promosi Pembangunan daerah Hasil: Terpublikasinya informasi pembangunan daerah	100%	0	0	0	0	0	100%	100%	100%



Dari pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2022 program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan meliputi :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi sebesar Rp 4.990.500,- atau 99,81% dari anggaran sebesar Rp 5.000.000,-
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi sebesar Rp 43.553.100,- atau 90,19% dari anggaran sebesar Rp 48.290.840,-
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga realiasi sebesar RP 5.972.000,- atau 99,53% dari anggaran sebesar Rp 6.000.000,-
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi sebesar Rp 90.948.050,- atau 98,45% dari anggaran sebesar Rp 92.380.825,-
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan realisasi sebesar Rp 9.252.500,- atau 44,80% dari anggaran sebesar Rp 20.652.600,-
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan realisasi sebesar Rp 2.640.000,- atau 88,00% dari anggaran sebesar Rp 3.000.000,-
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi sebesar Rp 51.643.650 atau 96,53% dari Rp 53.500.000,-
8. Pengadaan Barang Milik Daerah dengan realisasi sebesar Rp 4.500.000,- atau 25,76% dari anggaran sebesar Rp 17.465.800,-

Secara umum pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2022 hampir sama dengan tahun sebelumnya. Total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program ini sebesar Rp 246.290.065,-, dan berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun



2022, realisasi fisik atas pelaksanaan program tersebut mencapai 79% sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp 213.499.800,- atau 86,69% dari total anggaran.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan meliputi :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp 1.000.000,- atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp 1.000.000,-
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan realisasi sebesar Rp 36.323.220,- atau 84,47% dari anggaran sebesar Rp 43.000.000,-
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi sebesar Rp 165.891.000,- atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp 165.891.000,-

Total anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di tahun 2022 sebesar Rp. 209.891.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 203.214.220 atau 96,82 %, dengan realisasi fisik sebesar 100%.

c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan meliputi :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi sebesar Rp 53.676.100 atau 72,38% dari anggaran sebesar Rp 74.155.000,-
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi sebesar Rp 16.995.000 atau 88,93% dari anggaran Rp 19.110.000,-
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan realisasi sebesar Rp 3.000.000 atau 94,10% anggaran sebesar Rp 3.188.592,-

Total anggaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di tahun 2022 sebesar Rp.



96.453.592,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.671.100 atau 76,38 %, dengan realisasi fisik sebesar 100%.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Meliputi Sub kegiatan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan realisasi sebesar Rp. 9.000.000 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp. 9.000.000,-

Total anggaran anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 9.000.000,- realisasi keuangan kegiatan ini adalah Rp.9.000.000,- atau 100,00 % sedangkan realisasi fisik 100%.

e. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari Sub kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 194.500,- atau 97,25% dari anggaran sebesar Rp. 200.000,-
2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 193.000,- atau 96,50% dari anggaran sebesar Rp. 200.000,-
3. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 194.500 atau 97,25% dari anggaran sebesar Rp. 200.000.
4. Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 193.000,- atau 96,50% dari anggaran sebesar Rp. 200.000,-
5. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 190.400,- atau 95,20% dari anggaran sebesar Rp. 200.000,-



6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.901.500,- atau 99,82% dari anggaran sebesar Rp. 26.950.000,-

Total anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 27.950.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.866.900 atau sebesar 99,70% dan realisasi fisik sebesar 100%.

f. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Dengan Sub Kegiatan Meliputi :

1. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan realisasi sebesar Rp 18.204.000,- atau 90,46% dari anggaran sebesar Rp 20.122.745,-
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan realisasi sebesar Rp 18.204.000,- atau 99,78 % dari anggaran sebesar Rp 18.243.000,-

Total anggaran untuk Kegiatan ini sebesar Rp. 38.365.745,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.224.750,- atau sebesar 94,42% dan realisasi fisik sebesar 100%.

g. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Dengan Sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 207.314.500,- atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp. 207.371.525,-
2. Pembinaan Kerukunan Atarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan local, Regional dan Nasional dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 139.560.000 atau 99,34% dari anggaran sebesar Rp. 140.493.000,-

Secara umum realisasi fisik pelaksanaan kegiatan pada program ini berlangsung dengan baik. Adapun realisasi keuangan untuk program ini sebesar Rp. 346.874.500,- atau 99,72% dari anggaran sebesar Rp. 347.864.525 dan realisasi Fisik 100%.

h. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dengan Sub kegiatan yang terdiri dari :

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.828.750,- atau 95,99% dari anggaran sebesar Rp. 16.490.000,-
2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.640.000 atau 86,43% dari anggaran sebesar Rp. 9.996.200,-

Total anggaran untuk Kegiatan ini sebesar Rp. 26.486.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.468.750,- atau sebesar 92,38% dan realisasi fisik sebesar 100%.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Membalong adalah melaksanakan fungsi sebagai Pelayanan kepada masyarakat, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dan Perbup No. 63 Tahun 2016. Kecamatan Membalong mempunyai tugas pokok melaksanakan Upaya peningkatan Kualitas pelayanan dan mewujudkan Masyarakat maju, mandiri dan sejahtera dengan memfasilitasi pengoptimalan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Membalong telah melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Membalong Tahun 2024 – 2026 ,

Kinerja pelayanan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung berdasarkan Renstra PD periode sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelancaran operasional kantor

Dalam mendukung tugas dan fungsinya, Kecamatan Membalong tetap membutuhkan dukungan operasional kantor yang terus dipenuhi setiap tahunnya secara rutin. Kebutuhan operasional tersebut meliputi :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah

Dalam rangka peningkatan pelayanan aparatur, Kecamatan Membalong telah melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 13 (tiga belas) macam yang terdiri dari :

- 5 SOP di seksi Pemerintahan
- 1 SOP di seksi Kesejahteraan Sosial
- 7 SOP di seksi Trantibum dan Pelayanan

2. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Kebutuhan sarana dan prasarana yang telah dipenuhi untuk mendukung kinerja pelayanan di kecamatan Membalong adalah sebagai berikut :

- Gedung kantor, Gedung Pertemuan, pagar, tempat parkir dan penataan halaman kantor;
- Pemeliharaan kendaraan dinas operasional
- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Pengadaan peralatan, Mebeleur dan perlengkapan kantor
- Pengembangan sarana Ibadah dll .

3. Penyusunan dokumen laporan kinerja dan keuangan PD

- o LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Inti dari LAKIP adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang visi, misi organisasi, serangkaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- o LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), yaitu Laporan yang menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah melalui PD berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Departemen Dalam Negeri;
- o LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), merupakan Laporan Kepala Daerah kepada DPRD yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pelaksanaan program. Isi laporan ini hanya mengungkapkan apa yang sudah dikerjakan namun tidak menggambarkan apakah sasaran pemda berhasil atau tidak. Dalam hal ini PD menyampaikan bahan laporan sesuai dengan urusannya;



- Laporan Keuangan PD, yaitu produk akhir dari proses akuntansi yang dilakukan oleh PD dan kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten. Laporan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, LO, LPE dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

4. Tersedianya sarana pendukung disiplin aparatur

Dalam rangka upaya peningkatan disiplin aparatur, Kecamatan Membalong melaksanakan upaya-upaya dengan penyediaan sarana pendukung sebagai berikut :

1. Penyediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
2. Penyediaan Pakaian Khusus hari tertentu

5. Meningkatkan kualitas koordinasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat, ketentraman ketertiban, pemerintahan, kesejahteraan sosial , ekonomi pembangunan dan perencanaan pembangunan

Dalam mendukung tugas dan fungsinya, Kecamatan Membalong melaksanakan program dan kegiatan berkaitan dengan pembinaan dan evaluasi yang meliputi :

- Pembinaan Keagamaan.
- Promosi potensi daerah
- Pembinaan Perangkat Desa
- Evaluasi perkembangan desa
- Pembinaan nilai-nilai kebangsaan
- Pembinaan Kesehatan Masyarakat
- Seleksi / Pemilihan Bujang Dayang /Duta tk Kecamatan
- Penguatan bidang adat istiadat dan seni budaya
- Pembinaan Pemuda dan Olahraga
- Musrenbang
- Pembinaan dan Evaluasi UKS tingkat Kecamatan dan lomba balita sejahtera



Sebelum melakukan evaluasi tersebut, terlebih dahulu harus dilakukan pengukuran atas pencapaian sasaran. Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Membalong
Kabupaten Belitung 2024-2026

No	Indikator	SPM/standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Nilai survey Kepuasan Masyarakat									
2	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan			100%	100%	100%				
3	indeks Profesionalitas			90%	90%	90%				



	ASN pnegkat daerah									
4	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah			100%	100%	100%				
5.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur			100%	100%	100%				
6.	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa			100%	100%	100%				
7.	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			100%	100%	100%				



8.	Persentase Desa Taat Administrasi			100%	100%	100%				
----	-----------------------------------	--	--	------	------	------	--	--	--	--

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan Membalong dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Membalong antara lain :
 - a. Bangunan/Gedung Kantor Camat Membalong yang ada saat ini dirasakan sudah kurang representatif, mengingat gedung kantor yang saat ini ditempati adalah gedung yang dibangun pada tahun 1982, sehingga kondisinya saat ini cukup memprihatinkan, ditambah lagi dengan terbatasnya luas bangunan yang dirasakan terlalu sempit seiring dengan penambahan jumlah aparatur ASN dimasa yang akan datang. Hal ini dirasakan cukup mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan tugas-tugas rutin kantor serta kelancaran tugas pelayanan masyarakat.
 - b. Belum terpenuhinya semuanya usulan – usulan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Belitung.
 - c. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Membalong sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Membalong terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi



tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek .

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (software – Hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan.
- b. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik

Peluang :

- a. .Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya
- c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Membalong terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

- a. Urusan Perencanaan Pembangunan . Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2021 dan 2022,telah

dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi.

b. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian.

Tugas dan fungsi OPD Kecamatan Membalong yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan memiliki wilayah kerja tertentu, dengan demikian baik gambaran tentang kondisi umum daerah maupun kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan, akan difokuskan pada pelaksanaan teknis kewilayahan di Kecamatan Membalong.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2024.
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (prosedur Bottom Up).
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.
4. Review terhadap rancangan awal RKPD, yaitu proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan



untuk mencapai program yang tidak tercapai atau melebihi target kinerja pada tahun sebelumnya. Berikut tabel hasil review rancangan awal RKPD tahun 2024



Tabel
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Belitung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indicator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indicator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec.Mbl	1. Peresentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah 3. Persentase Pelayanan Administrasi		4.582.570.500	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec.Mbl	1. Peresentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah 3. Persentase Pelayanan Administrasi	100% 75% 100%	3.434.078.844	



			Perkantoran Perangkat daerah 4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor					Perkantoran Perangkat daerah 4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100%		
1	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Mb 1	Keluaran : Dokumen hasil perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai peraturan	10 dok 100%	6.000.000	1. Kegiatan: Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Mb 1	Keluaran : Dokumen hasil perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai peraturan	10 dok 100%	2.022.000	
	Sub kegiatan: 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Keluaran: Dokumen Perencanaan perangkat daerah		1.000.000	Sub kegiatan: 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Keluaran: Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokum en	337.000	
	2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD		Keluaran: Dokumen Perencanaan perangkat daerah		1.000.000	2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD		Keluaran: Dokumen RKA-SKPD	1 dokum en	337.000	
	3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		Keluaran: Dokumen Perencanaan perangkat daerah		1.000.000	3. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		Keluaran: Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 doku men	337.000	



	4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Keluaran: Dokumen Perencanaan perangkat daerah		1.000.000	4. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD		Keluaran: Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	337.000	
	5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD		Keluaran: Dokumen Perencanaan perangkat daerah		1.000.000	5. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD		Keluaran: Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	337.000	
	6. Evaluasi kinerja perangkat daerah		Keluaran: Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah		1.000.000	6. Evaluasi kinerja perangkat daerah		Keluaran: Evaluasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen	337.000	
2	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kec.Mb 1	Keluaran : dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya Dokumen Keuangan sesuai Peraturan	3 dok 100%	2.783.764.000	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kec.Mb 1	Keluaran : dokumen keuangan perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya Dokumen Keuangan sesuai Peraturan	4 dok 100 %	2.702.128.844	
	Sub kegiatan: 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Keluaran: Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	2.781.264.000	Sub kegiatan: 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Keluaran: Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan	2.701.454.844	
	2. Penyusunan pelaporan analisa prognosis dan realisasi anggaran		Keluaran: Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi keuangan	2 dokumen	2.500.000	2. Penyusunan pelaporan analisa prognosis dan realisasi anggaran		Keluaran: Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi keuangan	2 dokumen	377.000	
3	Kegiatan: Administrasi	Kec.Mb 1	Keluaran : Kinerja Aparatur yang baik	4 orangkali	21.000.000	Kegiatan: Administrasi	Kec.Mb 1	Keluaran: Kinerja Aparatur yang baik	4 Orangkali	24.000.000	



	Kepegawaian Perangkat Daerah		Hasil : Kepatuhan Pegawai Terhadap Peraturan	100%		Kepegawaian Perangkat Daerah		Hasil: Kepatuhan Pegawai Terhadap Peraturan	100%		
	Sub Kegiatan: 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Keluaran: Pakaian dinas	17 stel	10.000.000	Sub Kegiatan: 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		Keluaran: Pakaian Dinas			0
	2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Keluaran: Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 orang	11.000.000	2. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Keluaran: jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang kali	24.000.000	
4	Administrasi umum Perangkat Daerah	Kec.Mb 1	Keluaran: Terpenuhinya administrasi Umum Perangkat daerah Hasil: Persentase Pelayanan Administras Perkantoran Perangkat daerah	100% 100%	264.839.900	Administrasi umum Perangkat Daerah	Kec.Mb 1	Keluaran: Terpenuhinya administrasi Umum Perangkat daerah Hasil: Persentase Pelayanan Administras Perkantoran Perangkat daerah	100% 100%	320.997.700	
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		Keluaran: Kpmponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	7.350.000	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		Keluaran: Kpmponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	9.000.000	
	2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Keluaran: Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	51.620.000	2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor		Keluaran: Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	42.000.000	



	3. Penyediaan peralatan rumah tangga		Keluaran: Peralatan rumah tangga	100%	8.500.000	3. Penyediaan peralatan rumah tangga		Keluaran: Peralatan rumah tangga	100%	7.000.000	
	4. Penyediaan bahan Logistik kantor		Keluaran: bahan logistic kantor	100%	103.491.000	4. Penyediaan bahan Logistik kantor		Keluaran: bahan logistic kantor	100%	130.997.700	
	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Keluaran: barang cetak dan penggandaan	100%	29.798.900	5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Keluaran: barang cetak dan penggandaan	100%	22.000.000	
	6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan		Keluaran: bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	4.080.000	6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan		Keluaran: bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	0	
	7. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Keluaran: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	60.000.000	7. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Keluaran: Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	110.000.000	
5	Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kec.Mb 1	Keluaran: Jenis Barang Milik Daerah Hasil: Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana aparatur	3 jenis 100%	86.747.500	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kec.Mb 1	Keluaran: Jenis Barang Milik Daerah Hasil: Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana aparatur	3 jenis 100%	117.747.500	
	Sub kegiatan : 1. Pengadaan Mebel		Keluaran: Jenis Mebel	3 jenis	27.247.500	Sub kegiatan : 1. Pengadaan Mebel		Keluaran: Jenis Mebel	3 jenis	27.247.500	
	Sub kegiatan : 2. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		Keluaran: Jenis peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	44.500.000	Sub kegiatan : 2. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		Keluaran: Jenis peralatan dan mesin lainnya	5 jenis	75.500.000	



	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Keluaran: Gedung Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 jenis	15.000.000	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Keluaran: Gedung Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 jenis	15.000.000
	2. Pengadaan Meubelair		Keluaran: Meubelair	2 Jenis	25.000.000	3. Pengadaan Meubelair		Keluaran: Meubelair	2 Jenis	25.000.000
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Mb 1	Keluaran: Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran Hasil: Kelancaran Operasional Kantor	100% 100%	209.891.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Mb 1	Keluaran: Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran Hasil: Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat daerah	100% 100%	181.712.800
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat		Keluaran: Jumlah materai	100 lembar	1.000.000	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan jasa surat menyurat		Keluaran: Jumlah materai	100 lembar	1.000.000
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Keluaran: jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	48.000.000	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Keluaran: jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	48.000.000
	3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Keluaran: -.tenaga non PNS sopir -. Tenaga non PNS petugas kebersihan	1 orang	165.891.000	3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Keluaran: -.tenaga non PNS sopir -. Tenaga non PNS petugas kebersihan	1 orang 2 orang	132.712.800



			-tenaga non PNS Petugas administrasi	2 orang 2 orang				-tenaga non PNS Petugas administrasi	2 orang		
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Kec.Mb 1	Keluaran: Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Hasil: Kelancaran Operasional kantor	8 jenis 100%	76.740.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Kec.Mb 1	Keluaran: Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Hasil: Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	8 jenis 100%	85.470.000	
	Sub kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Mb 1	Keluaran: Kendaraan dinas/operasional/lap angan roda empat yang dipelihara Kendaraan dinas/operasional/lap angan roda dua yang dipelihara	1 unit 10 unit	34.725.000	Sub kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec.Mb 1	Keluaran: Kendaraan dinas/operasional/lapan gan roda empat yang dipelihara Kendaraan dinas/operasional/lapan gan roda dua yang dipelihara	1 unit 10 unit	40.035.000	
	Sub kegiatan: 2. Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Kec.Mb 1	Keluaran: Kendaraan dinas/operasional/lap angan roda empat yang dipelihara Kendaraan dinas/operasional/lap angan roda dua yang dipelihara	1 unit 1 unit	22.905.000	Sub kegiatan: 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	Kec.Mb 1	Keluaran: Kendaraan dinas/operasional/lapan gan roda empat yang dipelihara Kendaraan dinas/operasional/lapan gan roda dua yang dipelihara	2 unit 10 unit	22.905.000	



	2.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Keluaran; Peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	30 unit	19.110.000	2.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Keluaran; Peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	30 unit	22.530.000	
	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec.M bl	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	100%	232.978.500	2. Penguatan bidang seni dan budaya	Kec.M bl	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa	100%	232.978.500	
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Mb 1	Keluaran: laporan hasil kegiatan Pemberdayaan Desa Hasil: Pemberdayan desa terkoordinasi dengan baik	1 dok 100%	151.289.300	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Mb 1	Keluaran: laporan hasil kegiatan Pemberdayaan Desa Hasil: Pemberdayan desa terkoordinasi dengan baik	1 dok 100%	147.289.300	
	Sub Kegiatan: 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kec.Mb 1	Keluaran: Dokumen hasil MUSRENBANG	1 dok	22.000.000	Sub Kegiatan: 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Kec.Mb 1	Keluaran: Dokumen hasil MUSRENBANG	1 dok	22.000.000	
	2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec.Mb 1	Keluaran: Jumlah event pemberdayaan masyarakat	8 event	129.289.300	2.Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec.Mb 1	Keluaran: Jumlah event pemberdayaan masyarakat	8 event	125.289.300	
	3.Program Penyelenggaraan Urusan	Kec.M bl	Persentase Penyelenggaraan	100%	388.330.000	3.Program Penyelenggaraan Urusan	Kec.M bl	Persentase Penyelenggaraan	100%	388.330.000	



	Pemerintahan Umum		Urusan Pemerintahan Umum			Pemerintahan Umum		Urusan Pemerintahan Umum			
1	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Mb 1	Keluaran: Laporan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah Hasil: Terselenggaranya urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala daerah	1 dok 100%	400.000.000	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Mb 1	Keluaran: Laporan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah Hasil: Terselenggaranya urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala daerah	1 dok 100%	400.000.000	
	Sub Kegiatan: 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Keluaran : Jumlah Peserta	48 orang	250.000.000	Sub Kegiatan: 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Keluaran : Jumlah Peserta	48 orang	250.000.000	
	2.Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan regional dan nasional		Keluaran: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	180 orang	150.000.000	2.Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan regional dan nasional		Keluaran: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	180 orang	150.000.000	



	4.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.M bl	Persentase Desa Taat Administrasi	100%	49.987.250	4.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.M bl	Persentase Desa Taat Administrasi	100%	49.987.250	
1	Kegiatan: Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Mb 1	Keluaran: Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Hasil: Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Dok 100%	49.987.250	Kegiatan: Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Mb 1	Keluaran: Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Hasil: Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Dok 100%	49.987.250	
	Sub Kegiatan : 1. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec.Mb 1	Keluaran : Dokumen evaluasi perkembangan desa	1 dok	24.996.550	Sub Kegiatan : 1.Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kec.Mb 1	Keluaran : Dokumen evaluasi perkembangan desa	1 dok	24.996.550	
	2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa		Keluaran : Dokumen hasil Evaluasi RPJMDes,RKPDes, RAPBDes,Perubahan RKPDes dan Perubahan RAPBDes	5 dok	24.990.700	2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan pembangunan desa		Keluaran : Dokumen hasil Evaluasi RPJMDes,RKPDes, RAPBDes,Perubahan RKPDes dan Perubahan RAPBDes	5 dok	24.990.700	



Dari hasil perbandingan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu perlu adanya penambahan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau jabatan
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
3. Pengadaan Mebel

a. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Membalong tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Belitung dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa
3. Peningkatan kualitas nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat dan aparaturnya
4. Peningkatan potensi daerah dalam meningkatkan pariwisata Kecamatan Membalong

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut di atas didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Membalong maka perlu diusulkan ke empat program tersebut untuk dilaksanakan dan dicapai oleh Kecamatan Membalong. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

- a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.



- b. Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa / Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2024
Perangkat Daerah: Kecamatan Membalong

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Catatan
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	-			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dalam mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi dapat terwujud dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik.

Kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Membalong adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum
2. Menyusun usulan anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006
3. Meningkatkan kualitas kinerja Kepala Seksi
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan sesuai dengan visi, misi dan kebutuhan masyarakat Kecamatan Membalong melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
5. Meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunan
6. Meningkatkan potensi sumber daya manusia dan ekonomi

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Membalong antara lain Program Nasional yang dilaksanakan sesuai APBD Tahun 2023 oleh Kecamatan Membalong adalah :

URUSAN PEMERINTAHAN



NO	PROGRAM NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN /KOTA
1.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	V	V
2.	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	V	V
3.	Program Peningkatan kapasitas Keuangan Daerah	V	V
5.	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah	V	
	Jumlah	4	3

1.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Membalong Tahun 2024-2026 yang ingin dicapai pada tahun 2024 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra. Perumusan tujuan dan sasaran Renja PD seperti yang telah dirumuskan di dalam rumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: **“Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas di Kecamatan Membalong”**

Sasaran Renja Kecamatan Membalong tahun 2024 adalah :

1. Meningkatnya prestasi pelayanan publik Kecamatan Membalong
2. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

1.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Membalong Tahun 2024 sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Membalong Tahun 2024 ada beberapa :

a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan prog. dan Keg. /pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :

- Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belitung ,
- Pencapaian SDGs,

- Pengentasan Kemiskinan,
- Pencapaian NSPK dan SPM,
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- Pengembangan daerah terisolir,
- Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan
- Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
- meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya , pemerintahan infrastruktur
- Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
- Ketersediaan aparatur perencana yang mempunyai kompetensi yang memadai
- Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Membalong Tahun 2024 disusun dengan menjalankan RKPD walau dengan belum adanya Kepala Daerah yang terpilih atau dalam masa Pemilu Tahun 2024.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2024 ini, Perangkat Daerah Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung merencanakan 4 (empat) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan. Dengan jumlah total Rasionalisasi Pagu Indikatif sebesar Rp. 4.582.570.500,-(empat milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan lokasi kegiatan di Kecamatan Membalong.

Sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Belitung murni Rp. 4.582.570.500.-

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Membalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Membalong Tahun 2024 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas

dan fungsi PD dalam kerangka perumusan penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung serta penyusunan perencanaan anggaran.

2. Jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai mana table 3.3.1

Tabel 3.3.1

Nama Program Jumlah Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7 Kegiatan	29 Sub Kegiatan	3.884.736.500
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan	2 sub Kegiatan	233.834.000
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Kegiatan	2 Sub Kegiatan	410.000.000
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 Kegiatan	2 Sub Kegiatan	54.000.000
		JUMLAH		4.582.570.500

Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Kecamatan Membalong Tahun 2024 secara total sebesar Rp.4.582.570.500,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Belitung.



Program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Membalong Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Belitung Kecamatan Membalong.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung telah disusun sebagaimana disajikan pada tabel 3.3

Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan tersebut telah mempedomani dan telah diselaraskan dengan dokumen RKPD Kabupaten Belitung tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen

Rencana strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran



BAB V


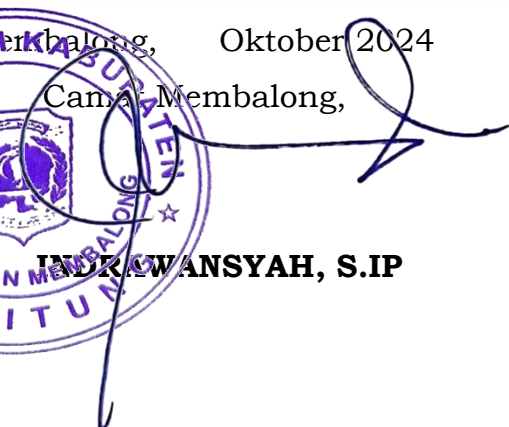
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Membalong tahun 2024 ini disusun berdasarkan visi misi Kecamatan Membalong yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatannya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Belitung. Rencana kerja yang merupakan perencanaan satu tahun ke depan dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan pihak terkait di Kecamatan Membalong untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Membalong merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Renstra OPD Kecamatan Membalong untuk tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja OPD Kecamatan Membalong memuat sasaran, program dan kegiatan Tahun 2024 yang dilengkapi dengan indikator kinerja dengan target capaian tahun 2024

Akhirnya, dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga visi dan misi OPD Kecamatan Membalong dapat tercapai.

Membalong, Oktober 2024
Camat Membalong,



INDRIWANSYAH, S.IP